

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Kementerian Agama. "Al-Baqarah Ayat 282." Kementerian Agama, 2025 (diakses pada tanggal 6 September 2025 pukul 18.17 WIB).

Kementerian Agama."Al-Maidah Ayat 8." Kementerian Agama, 2025. (diakses pada 12 September 2025 pukul 15.42 WIB)

Kementerian Agama."Al-Maidah Ayat 38." Kementerian Agama, 2025. (diakses pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 18.48 WIB).

Kementerian Agama."Al-Nahl Ayat 43." Kementerian Agama, 2025. (diakses pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 02.14 WIB).

Buku-buku dan Kitab

Adam Chazawi. "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*," Cetakan 1., 5. Malang: Media Nusa Creative, 2018

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Andi, Hamizah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Cetakan ke 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024
- Arsil, Astriyani, Dian Roswati, dan M. Tanziel Aziezi. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: The East-West Center (EWC), 2021
- Audah, Abdul Qadir. “*Al Islam Wa Audha’unal Qanuniyyah.*” *Islam Dan Perundang-Undangan*, Alih Bahasa K.H. Firdaus A.N, Cetakan ke-6. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Bahansyi, Ahmad Fathi. “*Nasyriyatul Isbat fil Fiqihil Jina’I Al-Islami*”, Alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013
- Dessy Marliani Listianingsih, Chatrina Darul Rosikah; *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Ermansjah, Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kmisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

- Evi, Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2005
- Indrayana, Donny. *Jangan Bunuh KPK; Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing, 2016
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayatud-Diiniyyah*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996
- Kurniawan, Rudy Cahya. *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta:Deepublish, 2021
- Kusumah, Mulyana W. *Tegaknya supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ke-1, 2001
- Madzkur, Muhammad Salam. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Mardjono, reksodiputro. “*Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*,” Cetakan ke-1. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT Alumni, 2022

Nomensen, Sinamo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009

Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Yogyakarta:CV Jejak, 2018

Shieddieqy, Muhammad Hasbi Ash. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra,1997

Sinaga, Hasudungan. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Edited by Al ZAkaria. Kalimantan Selatan: Ruang karya Bersama, 2023

Siska, Sulistiani Lis. *Peradilan Islam*. Edited by Ahmad Kurniawan. Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Skripsi dan Jurnal Penelitian

Aditya Redaya, Helvis Helvis, I Made Kantikha, dan Nardiman. “*Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 01-18.
<https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.56>.

Aji, Dena, Aditya Tampubolon, Halimah Citra, Rizky Bayu, dan Herli Antoni. “*Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer*” 1, no. 2 (2023).

Ariyanti, Dwi Oktafia, and Nita Ariyani. “*Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 328–44.

Basri, E, and A Muliawan. “*Analisis Yuridis Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” *JCA of law*, 2021:

<https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/290%0Ahttps://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/viewFile/290/237>.

Dwiasty, Refniayu, Mulyati Pawennei, dan Baharuddin Badaru. “*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.*” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024).

Faridzi, Mohammad Al, and Gunawan Nachrawi. “*Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021).*” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3014–19.

Fauzi, Muhammad Rifky Aji, dan Sri Endah Wahyuningsih. “*Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi.*” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (2023): 1126–41.

- Fikriyah, Amalina, Universitas Negeri Semarang, and Ali Masyhar. "Jurnal Hukum & Pembangunan *Justice Collaborator Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara*" 53, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1558>.
- Gifari, Hafiz Al. "*Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.*" Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. "*Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).*" Masalah-Masalah Hukum 49, no. 3 (2020): 314–23.
- Ibrahim Aji, Anwar. "*Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi* Skripsi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Karunia, Ana Aniza. "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.*" Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 1 (2022): 115.
- Luqman, Fatkhul. "*Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas Justice Collaborator Dalam Peradilan Di Indonesia).*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

- Mareta, Josefhin. “*Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban.*” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10, N (2016): 106.
- Rahman Aulia, Mispansyah. “*Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencicil Dalam Perspektif Yang Berkeadilan*” 5 No. 2 (2024): 624.
- Rizkika maharani, Loventa. “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.).*” Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science 1, no. 1 (2021): 386–96.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. “*Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 49
- Sirait, Adi Syahputra. “*Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana.*” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 241–56. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.

Yurannisa, Ulfa. *“Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018.”* UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.

Zakaria,M. *“Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar’iyyah)”* HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam 1,no.1(2017):46-52.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?=1098973&val=16488&title=PERADILANDALAMPOLITIKISLAMALQADHAIYYAHFISSIYASAHASSYARIYYAH>

Zidni,Irfan. *“Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia.”* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1999 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu No. 4 Tahun 2011

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*

Tambahan Lembaran Negara Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*

Website

Korupsi, Komisi Pemberantasan. “Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>.

“statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi”

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Pengertian Korupsi*,
<https://kbbi.web.id/korupsi>.